

PENGARUH PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 TERHADAP KONDISI SOSIAL POLITIK DI CIREBON

Ahmad Faiz Rofi'i^{1*}, Mus'af², Galun Eka Gemini³

Program Studi Pendidikan Sejarah, Institut Pangeran Dharma Kusuma Indramayu
Jl. Ketapang, Segeran Kidul, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

*E-mail: ahmadfaizrofii@gmail.com

Abstract: *This article examines the influence of the 1965 G30S events on socio-political conditions in Cirebon. This research uses historical methods which includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results showed that the socio-political conditions in Cirebon before the G30S event were quite stable. However, after the G30S incident, the situation in Cirebon was uncontrollable, there were mass actions, and demands for the dissolution of the PKI by various youth organizations and mass organizations, one of which was Nahdlatul Ulama. NU was the most vocal in its demands because it could not be separated from the history of the old order period, which was quite tense, especially when the PKI launched unilateral actions. After the G30S, the situation in Cirebon was not as critical as in East and Central Java, where large-scale casualties occurred. However, small-scale movements occurred in several places, such as in Kapetakan, Plumbon, Astanajapura, Lemah Abang, Karang Wareng, and Waled. Preventive efforts were immediately made both at the provincial and local levels by West Java Governor H. Mashudi and Commander Ibrahim Adjie by issuing a policy prohibiting PKI activities and making rules to dismiss employees, government officials suspected of being PKI. As a result, the Mayor of Cirebon RSA. Prabowo and Cirebon District Regent E. Harun Zainal Abidin as PKI cadres were dismissed and imprisoned in 1966.*

Keywords: *Socio-Politics, Cirebon, G30S 1965*

Abstrak: Artikel ini mengkaji pengaruh peristiwa G30S 1965 terhadap kondisi sosial politik di Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan kondisi sosial politik di Cirebon sebelum peristiwa G30S cukup stabil. Namun, setelah peristiwa G30S, situasi di Cirebon tidak terkendali, terjadi aksi massa, hingga tuntutan pembubaran PKI oleh berbagai organisasi kepemudaan dan ormas, salah satunya Nahdlatul Ulama. NU paling vokal dalam tuntutanannya karena tidak lepas dari sejarah masa orde lama yang cukup mencekam, terutama saat PKI melancarkan aksi sepihak. Setelah G30S, situasi di Cirebon tidak segenting di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memakan korban jiwa dalam skala besar. Namun, gerakan berskala kecil terjadi di beberapa tempat, seperti di Kapetakan, Plumbon, Astanajapura, Lemah Abang, Karang Wareng, dan Waled. Upaya pencegahan segera dilakukan baik di tingkat provinsi maupun daerah oleh Gubernur Jawa Barat H. Mashudi dan Panglima Ibrahim Adjie dengan mengeluarkan kebijakan melarang aktivitas PKI dan membuat aturan memberhentikan pegawai, pejabat pemerintahan yang diduga PKI. Akibatnya Wali Kota Cirebon RSA. Prabowo dan Bupati Kabupaten Cirebon E. Harun Zainal Abidin sebagai kader PKI diberhentikan dan dipenjara pada tahun 1966.

Kata Kunci: Sosial Politik, Cirebon, G30S 1965

PENDAHULUAN

Diskursus seputar tragedi kemanusiaan pasca Gerakan 30 September (G30S) 1965 selama ini masih berkuat pada permasalahan siapa dalang pemberontakan, pembunuhan hingga penculikan pada jenderal Angkatan Darat. Lebih dari itu, tampaknya beberapa peneliti lebih condong menggeser pembahasan ke ranah pembantaian massal yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dari mulai menelusuri jejak pembunuhan, jumlah korban hingga identifikasi pelaku dan selalu menjadi topik menarik yang tidak pernah selesai. Akhirnya penelusuran sejarah mengenai gejolak sosial politik 1965-1966 hanya berkuat di daerah-daerah tertentu dengan intensitas peristiwa yang cukup tinggi seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. (Cribb, 2004).

Fokus penelitian mengenai gejolak sosial politik 1965-1966 tampaknya seperti melupakan daerah-daerah di sepanjang jalan pantura Jawa. Daerah-daerah tersebut jika dilacak memiliki jejak tersendiri terkait kehadiran Partai Komunis Indonesia (PKI) baik sejak masa kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan seperti di Pemalang, Tegal, dan Brebes, dikenal dengan peristiwa tiga daerah. (Lucas, 2019). Adapun di Cirebon pernah menjadi target percobaan kudeta oleh PKI pimpinan Mr. Mohammad Jusuf tahun 1946. (Djambhari, 2009). Daerah-daerah di atas seperti kurang menarik untuk diteliti lebih jauh dan hilang dari percaturan sejarah tahun 1965-1966 terutama di Cirebon. Padahal sudah menjadi hal umum jika terjadi pergolakan di tingkat nasional maka akan berdampak pada kondisi sosial politik di daerah. Kemudian, akan seperti apa kejadian di suatu daerah tertentu tergantung kondisi masyarakat dan sikap pemerintah di daerah tersebut.

Cirebon sebagai bagian wilayah Jawa Barat menjadi imbas dari peristiwa G30S. Kisruh politik tahun 1965-1966 menjadi momen mencekam. Pembakaran sekretariat Partai Komunis Indonesia (PKI), aksi demonstrasi oleh organisasi pemuda dan partai politik terutama partai Nahdlatul Ulama (NU), gerakan massa di Kapetakan, Cikeduk hingga Waled menjadi salah satu dari beberapa kondisi yang terjadi di Cirebon pasca berita G30S menyebar di seluruh penjuru tanah air.

Uniknya gejolak sosial politik di Cirebon tidak segenting di Jawa Tengah dan Jawa Timur. yang menimbulkan korban jiwa dalam

skala besar. Tentunya ini sangat unik karena jika dilihat dari efek domino yang timbul, seharusnya Cirebon mengalami kejadian yang serupa seperti di Jawa Tengah karena letak geografis Cirebon berbatasan langsung di sebelah timur dengan Jawa Tengah.

Keunikan inilah yang membuat penulis ingin meneliti daerah ini. Penulis ingin mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Cirebon sebelum terjadinya peristiwa G30S 1965 sehingga tidak terkena efek domino dari kejadian-kejadian seperti di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan karena biasanya gejolak sosial masyarakat yang terjadi pasca G30S sangat dipengaruhi oleh fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada peristiwa sebelumnya seperti di Jawa Tengah.

Agar penelitian tidak melebar, maka lingkup temporal dalam penelitian ini adalah tahun 1964 sampai tahun 1966. Tahun 1964 dipilih sebagai batas awal karena tahun ini PKI melancarkan aksi sepihak. PKI menganggap pemerintah gagal melaksanakan program *landreform*. Pada tahun ini juga D.N. Aidit selaku pimpinan PKI menghadiri pertemuan PKI di Lemah Abang Cirebon. Tahun 1966 dipilih sebagai batas akhir karena pada tahun ini PKI dianggap sebagai dalang pembunuhan dewan Jendral kemudian partai ini dibubarkan secara resmi pada 12 Maret 1966.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah bertujuan untuk merekonstruksi kejadian masa lampau secara sistematis, objektif dan kritis berdasarkan sumber-sumber sejarah dengan menggunakan empat tahapan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. (Kuntowijoyo, 2003). Pada tahap heuristik, penelitian ini menggunakan sumber Inventaris Arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) seperti arsip operasi komando militer perihal kunjungan D.N. Aidit pada pertemuan PKI di Cirebon tahun 1964. Surat kabar *Duta Masyarakat* tahun 1960-1964 yang memberitakan ketegangan antara BTI dan NU pasca kasus *landreform* di Losari. Ada juga surat kabar *Pikiran Rakyat* edisi 8 Oktober 1965 yang menginformasikan telah terjadi beberapa peristiwa pasca G30S di Jawa Barat terutama di Cirebon.

Penulis juga menggunakan sumber laporan dokumen dan audio visual berupa foto dan catatan peristiwa G30S yang tersimpan di

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota dan Kabupaten Cirebon, seperti catatan laporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Cirebon berjudul *Tjoretan dan Tjatatatan serta Sorotan* yang menginformasikan kondisi sosial politik di Cirebon pasca peristiwa G30S 1965. Selain itu, penulis menggunakan tinjauan pustaka sebagai bahan penelitian yang terdiri dari beberapa buku dan jurnal yang relevan dengan pembahasan. Misalnya artikel Nina Herlina Lubis “Tatar Sunda Digoncang Konflik Sosial Politik” dalam Taufik Abdullah, dkk., *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian II Konflik Lokal* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).

Sumber-sumber yang didapatkan kemudian dikritik secara internal, eksternal, dan ditafsirkan serta dianalisis. Selanjutnya disusun menjadi serangkaian peristiwa yang utuh dan kronologis menjadi sebuah karya historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Cirebon Sebelum Tahun 1960-an

Cirebon dikenal sebagai salah satu simpul utama jejaring distribusi ekonomi di Nusantara sejak abad ke-14. Cirebon juga disebut sebagai kota budaya yang terletak di sebelah utara ujung paling timur provinsi Jawa Barat. Kota ini telah menciptakan jejaring kebudayaannya sendiri sehingga berbagai fenomena kebudayaan beserta transformasi sosialnya seringkali muncul dalam bentuk yang berbeda dengan pusat-pusat kebudayaan mainstream, baik kebudayaan dan bahasa Sunda ataupun Jawa. Menurut Arovah (2018), hal ini terjadi karena posisi geografis Cirebon yang berada di antara kebudayaan Sunda dan Jawa melahirkan kebudayaan sendiri yang khas yakni kebudayaan Cirebon. Hal ini tidak lepas dari kehadiran etnis pendatang baik dari Arab, Cina, Sunda dan Jawa yang kemudian menjadikan Cirebon sebagai wilayah yang tidak lagi homogen akan tetapi bergerak menjadi heterogen.

Selain itu, kehidupan sosial keagamaan masyarakat Cirebon tidak terlepas dari kehadiran pesantren-pesantren tradisional yang sejak dulu menjadi kiblat penyebaran dan pengembangan agama Islam di Nusantara. Pesantren memainkan peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Pesantren sebagai

pusat pergerakan melahirkan nasionalisme, perlawanan terhadap penjajah baik di masa kolonial maupun di era kemerdekaan menandakan pergerakan semacam ini patut diperbincangkan. Bahkan embrio semangat menjaga keutuhan bangsa dari ancaman asing maupun gerakan perlawanan terhadap pemerintah yang sah, pesantren menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negeri. Di Cirebon misalnya, dua bulan pasca Soekarno memproklamkan kemerdekaan Indonesia, Pesantren di Cirebon seperti Buntet dan Ciwaringin yang diinisiasi oleh Kiai Abbas dan Kiai Amin Sepuh bahu-membahu menjadi satu bersama para santri ikut terlibat dalam perang rakyat semesta Surabaya 1945. (Rofii & Sujati, 2022).

Tidak hanya itu, percobaan kudeta PKI di Cirebon tahun 1946 pimpinan Mr. Mohammad Jusuf, dalam hal ini pesantren di Cirebon menjadi garis terdepan bersama Badan Keamanan Rakyat (BKR) untuk melawan aksi laskar merah tahun 1946. Selanjutnya, dalam perjalanan politik nasional, Cirebon memiliki posisi strategis. Hal ini bisa dilacak pasca PKI pimpinan Mr. Mohammad Jusuf gagal menguasai Cirebon. Kurang lebih satu tahun kemudian, daerah ini menjadi sasaran serangan Belanda pada Agresi Militer I pada 21 Juli 1947. Perlawanan yang terjadi di daerah Cirebon memegang peranan penting dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerja sama antara pihak Angkatan Bersenjata, Badan-Badan Perjuangan/Laskar, dan dukungan rakyat telah berhasil mengusir Belanda. (Rofii, 2023).

B. Keadaan Sosial Politik Cirebon Sebelum Peristiwa G30S 1965

Kondisi sosial politik sebelum peristiwa G30S 1965 tidak terlepas dari keadaan politik sebelumnya yakni antara tahun 1940-an hingga 1960-an yang digambarkan sebagai periode penuh dengan kekacauan di bidang sosial politik dan kemunduran di bidang ekonomi. J.A.C. Mackie (2002), menyebut periode tersebut sebagai kemandekan di bidang ekonomi nasional dan dapat ditafsirkan sebagai penghancur utama dengan perkembangan ekonomi sebelumnya. Jika melihat ke belakang, kondisi tersebut bermula pada tahun 1930-an ditandai dengan runtuhnya ekonomi kolonial saat Depresi Ekonomi menghantam Hindia Belanda, dilanjutkan masa pendudukan Jepang, perang kemerdekaan, revolusi dan perang sipil.

Berbagai peristiwa tersebut telah menimbulkan kehancuran struktural yang berdampak langsung pada kinerja nasional. Menurut J.A.C. Mackie (2002), banyaknya peristiwa yang melatarbelakangi pada periode tersebut telah menimbulkan trauma yang sangat mendalam dan akibatnya terasa selama 20 tahun pertama kemerdekaan baik di tingkat nasional maupun lokal.

Di Cirebon misalnya, secara umum masyarakat Cirebon belum begitu akrab dengan permasalahan politik. Hal ini didasari bahwa masyarakat masih berfokus pada masalah sosial dan ekonomi semenjak berakhirnya masa revolusi fisik. Pemerintah Cirebon baik di Kota maupun di Kabupaten berupaya membenahi permasalahan ekonomi yang belum tuntas seperti pengembangan industri, pembangunan jalan dan perdagangan di pelabuhan Muara Jati (Dispusip Kabupaten Cirebon, 2014).

Di bidang politik, pemerintah Kota dan Kabupaten Cirebon melaksanakan anjuran pemerintah Indonesia berdasarkan UU No.7 tahun 1953 tentang penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia yang akan diadakan pada tahun 1955. Dalam upaya tersebut pemerintah Kota dan Kabupaten segera menetapkan Panitia Pemilu yang dibentuk di setiap daerah pemilihan, seperti PPK (Panitia Pemilu Kota/Kabupaten) dibentuk di tingkat kota/kabupaten, PPS (Panitia Pemungutan Suara) dibentuk di tingkat kecamatan. Dalam hal ini di Cirebon berjalan lancar. Adapun pembentukan, pelantikan, dan rapat panitia pemilu dilaksanakan antara lain di Palimanan, Buntet, dan Lemah Abang. Sementara sosialisasi pemilu dilaksanakan antara lain diadakan di Pabrik Gula Sindang Laut dan pendopo kawedanan Palimanan (Dispusipda Provinsi Jawa Barat Arsip Audio Visual No. 494, 495, 496, 497).

Suasana menjelang pemilu 1955 di Cirebon cukup semarak. Terdapat poster atau gambar dari masing-masing partai, lembaran pamflet yang ditempel di transportasi umum, jalanan, bangunan, kantor pemerintahan, serta iklan-iklan yang terdapat pada surat kabar, maupun bioskop. Ada juga spanduk yang dipasang antara lain di prapatan Kejaksan, Prujakan, dan Gunung Sari (Dispusipda Provinsi Jawa Barat Arsip Audio Visual No. 493). Sementara, masyarakat Cirebon sangat antusias menyambut pemilu dengan ikut terlibat bergotong royong membangun Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahkan ada juga

masyarakat ikut serta baik menjadi anggota partai maupun simpatisan partai (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019).

Eva Nur Arovah menyebut Cirebon sebagai daerah di Jawa Barat yang dikenal masyarakatnya heterogen baik sosial, budaya, maupun politik, sehingga tidak salah jika Cirebon menjadi sasaran suara masing-masing partai. Jika dipetakan, partai politik di Cirebon dapat dikategorikan menurut ideologinya. Pertama, berhaluan nasionalis seperti Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Kedua, Partai beraliran Islam antara lain Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Ketiga, beraliran ideologi marxisme atau komunis seperti PKI. Keempat, partai beraliran sosialis terdapat partai Murba, partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan partai Katolik. Menjelang pemilu, masing-masing partai mewacanakan strategi untuk berperan di pentas politik lokal, sehingga tidak heran jika pada masa-masa kampanye terjadi gesekan di antara partai politik terutama partai-partai yang masuk dalam empat besar di Kabupaten maupun Kota Cirebon yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI (Rofi'i, 2023).

Pada pemilu 1955 yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante, di Cirebon secara umum berjalan lancar. Perolehan suara pada pemilu 1955 merupakan cerminan keberhasilan masing-masing partai. Persaingan dan kampanye partai politik juga tentu sangat menentukan tingkat keberhasilan partai. Berikut perolehan suara pada pemilu 1955 di Kota Cirebon: PKI menempati urutan pertama dengan 12.665 suara, disusul, PNI 9.536 suara, Masyumi 6.255 suara, dan partai NU menempati urutan keempat dengan perolehan 6.128 suara. Meskipun Kota Cirebon adalah basis PKI terutama yang berada daerah Pecinan, jauh berbeda di Kabupaten Cirebon, Partai NU keluar sebagai pemenang dan satu-satunya partai NU di Jawa Barat yang meraih kemenangan dengan perolehan 105.317 suara, disusul PKI 70.143 suara, PNI 63.720 suara, dan Masyumi 46.261 suara (Rofi'i, 2023).

C. Aktivitas Organisasi Politik

1. Berawal dari Pemilu 1955

Aktivitas organisasi maupun partai politik di Cirebon memberi dampak signifikan

mengenai keberlanjutan masing-masing partai. Hal ini bermula sejak bergulirnya pemilu 1955 yang meninggalkan jejak persaingan diantara partai politik. Kasus yang sering didengungkan adalah persepsi rakyat menurut pandangan masing-masing partai. Para aktor politik seringkali menggunakan slogan rakyat sebagai amunisi untuk melancarkan strateginya. Rakyat menurut pandangan Masyumi dikategorikan sebagai orang-orang Islam pribumi yang memegang teguh syariat Islam. Mereka menentang sistem demokrasi dan menjanjikan masyarakat bahwa jika mereka mendukung Masyumi, Negara Indonesia akan berlandaskan pada Negara dan hukum Islam. (Rofi'i, Rochwulaningsih and Alamsyah, 2022).

Sementara itu, antara NU dan PKI saling melempar pandangannya seperti NU mengidentikkan PKI sebagai "Partai Kriminal Indonesia" karena pendukungnya sering mencuri lahan tanah para kiai dan sering berjudi. Sedangkan PKI secara terbuka menghina para kiai di pedesaan yang mendukung NU disamakan sebagai tuan tanah. Sehingga, muncul anggapan bahwa PKI adalah partainya rakyat karena memikirkan nasib rakyat sedangkan NU sebagai partainya orang kolot karena hanya mengakomodasi kepentingan para kiai pedesaan dan pesantren. Di sisi lain, PNI menganggap bahwa partainya merupakan partai tengah-tengah, artinya partai bagi semua kalangan. PNI beranggapan tidak mencampur adukkan agama dan politik. PNI menganggap NU dan Masyumi sering kali melibatkan agama mereka dalam urusan politik (Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 2022).

Persaingan dan perbedaan ideologi partai sebagaimana dijelaskan mengakibatkan persepsi masyarakat terkait politik memanas. Terlebih dengan anggapan bahwa masyarakat saat itu kurang paham soal politik terutama dalam pemilu. Oleh karena itu, tidak heran jika pada masa itu kasus semacam ini sudah biasa terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal bahkan persaingan di antara partai terus berlarut-larut hingga periode 1960-an terutama persaingan antara NU dan PKI.

2. Aksi Sepihak BTI di Pedesaan

Persaingan antar parpol di Cirebon dalam hal ini yang paling mencolok adalah aktivitas hubungan antara NU dan PKI. Hal ini bermula tidak hanya pasca pemilu 1955 akan tetapi keduanya bersitegang setelah ditetapkannya

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 yang mengatur pemilikan dan penguasaan tanah serta Undang-undang Pertahanan dan Bagi Hasil (UUPBH) No. 2/1960 tanggal 24 September 1960 oleh Presiden Soekarno. (Pratikno, 2000). UU tersebut tidak berjalan mulus sebagaimana Ladenjinsky dalam laporannya mengatakan penyebab kegagalan *landreform* bersumber pada tingginya batas maksimum pemilikan tanah dan meluasnya penyelewengan dengan persekongkolan para pejabat desa. (Achdian, 2008).

Berangkat permasalahan di atas inilah kemudian PKI berinisiatif untuk menjalankan UU tersebut beralih ke tangan organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI). Pada pertengahan Agustus 1960-an misalnya, BTI mengenalkan UU bagi hasil dengan melakukan ceramah keliling di setiap desa. Tidak hanya itu, BTI mendesak para Bupati dan Walikota sebagai pejabat berwenang untuk segera menentukan jumlah perimbangan perjanjian bagi hasil. Desakan BTI ini tampaknya berjalan serentak di setiap daerah termasuk di Jawa Barat antara lain Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Cianjur, Ciamis, Subang, Indramayu dan Cirebon. (Achdian, 2008).

Pada 7 Agustus 1960, BTI mendesak Bupati Cirebon hingga menghasilkan keputusan Perda No. 5256/Pem 28/60 yang mengatur perimbangan bagi hasil. Diputuskan juga bahwa mekanisme bagi hasil di wilayah Cirebon dibedakan antara wilayah Cirebon Dalam dan Cirebon Pesisir. Di wilayah Cirebon Dalam umumnya merupakan usaha pertanian sawah basah, Bupati menetapkan sistem maron (imbangan 1:1) antara petani penggarap dan pemilik sawah. Sedangkan di wilayah Cirebon Pesisir yang umumnya pertanian di atas lahan kering, kebijakan bagi hasil ditentukan dengan sistem 2:3 yang berarti 2/5 hasil panen diberikan pada pemilik tanah, sedangkan 3/5 bagian menjadi pemilik penggarap. (Achdian, 2008).

Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan *landreform* ini memang tidak berjalan seperti yang ditentukan pemerintah pusat. Hingga Januari 1961 sampai 1963 karena adanya kendala dalam peraturan administrasi yang tidak efektif dan persekongkolan antara para tuan tanah dengan petugas, akhirnya persentase tanah didistribusikan sangat kecil. Ini merupakan dalih PKI untuk mempertahankan hak tanah yang sudah

seharusnya milik petani sesuai UU *landreform*. Atas dasar itulah menjadi pemicu PKI untuk mengambil alih tindakan *landreform*, dikenal dengan sebutan “aksi sepihak” dengan melaksanakan program *landreform* secara “radikal”. Anggota PKI yang tergabung dalam BTI dan Pemuda Rakyat (PR) melakukan kampanye aksi sepihak pada awal 1964 yang dipusatkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. (Achdian, 2008).

Sementara di Jawa Barat terutama di Cirebon, sebagai imbas dari gerakan PKI, BTI melakukan sabotase merusak sinyal oleh buruh Kereta Api hingga terjadi kasus kecelakaan Kereta Api di Cirebon pada 14 Mei 1964. Selain itu, BTI juga melakukan demonstrasi di Lemah Abang. Kasus ini berawal atas kepemilikan tuan tanah 3.000-4.000 hektar yang penghasilannya sangat besar karena tanahnya subur. Bahkan ada juga tuan tanah yang berjumlah ribuan hektar. Belum dengan sewa tanah juga lewat ijon, gadai, dan renten. (Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 2022).

Kasus serupa juga terjadi di desa Kalirahayu Tawang Sari, Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Menurut DPP BTI, di Losari ada tuan tanah yang memiliki tanah tambak kelebihan (*absente*) dari batas maksimum yang sudah ditetapkan oleh UU, tidak kurang dari 192 *bouw*. Tanah tersebut menurut BTI digelapkan yang dimiliki beberapa tuan tanah yang bertempat tinggal di Pangaben Brebes. Para tuan tanah tersebut memiliki tanah tidak kurang dari 32,55 hektar tanah. Berbeda terbalik dari laporan BTI, pada 28 November 1964, Ketua Panitia *Landreform* Cirebon, Mansur Kuwo menyebut bahwa tanah lebih seluas 10,238 hektar itu sudah dijual kepada 3 orang sejak 12 Agustus 1960. BTI mengelak pernyataan Kuwo itu tidak benar. Menurut BTI, jika benar mengapa tanah itu oleh panitia *landreform* Tk. II Cirebon tidak terdaftar sebagai tanah kelebihan, padahal kenyataannya tanah tersebut adalah tanah kelebihan. BTI mengatakan bahwa tindakan Kuwo ini sangat merugikan, dan jika dibiarkan, semua tanah kelebihan akan di gelapkan. (Achdian, 2008).

Satu hari kemudian, tepatnya pada 29 November 1964, D.N. Aidit menghadiri pertemuan PKI di Lemah Abang Cirebon. Dalam pidatonya, ia mencap para penentang *landreform* sebagai setan desa dan jangan sesekali berkonfrontasi dengan Soko Guru.

(ANRI, *Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi, Ringkasan Pidato D.N. Aidit Pada Rapat Umum PKI Di Cirebon, No. 458*).

Ini yang kemudian menjadi pemicu semangat PKI dan BTI untuk melanjutkan aksi teror kepada para tuan tanah maupun kepada panitia *landreform* di tingkat daerah. Misalnya, sebagai tindak lanjut dari kasus para tuan tanah di Losari, pada 14 April 1965, para petani yang berafiliasi dengan BTI mendesak panitia *landreform* Cirebon agar segera menguasai tanah-tanah yang di gelapkan dan memberikan surat hak garap kepada para petani penggarap, yang wajib membayar sewa kepada negara lewat panitia *landreform* dan bukan kepada tuan tanah. Selang satu minggu, DPP BTI melaporkan bahwa pada tanggal 22 April 1965 Pukul 23.00 pemilik tanah mengirimkan segerombolan orang untuk meneror dan menyerbu rumah-rumah para petani tersebut, merusak barang-barang, membacok, dan menganiaya siapa saja yang dijumpainya. BTI melaporkan bahwa mereka adalah bekas tentara Darul Islam yang diupah oleh para tuan tanah masing-masing Rp. 4.000,- dan 4 gedeng padi. (Achdian, 2008).

Berangkat dari kasus tersebut, bagi NU, pernyataan BTI tidak benar. NU kemudian mengambil sikap dalam rapat akbar MWC NU di desa Kalirahayu Kecamatan Losari yang diadakan pada Juni 1965 dan dihadiri langsung KH. Masjkur selaku ketua PBNU. Hasil rapat tersebut membantah semua pernyataan BTI. Melalui KH. Masjkur, menurutnya, hal itu hanya akal-akalan BTI memutarbalikkan fakta. Berikut pernyataan KH. Masjkur yang dimuat dalam surat kabar *Duta Masyarakat* edisi 3 Juni 1965:

“Saja merasa bersjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa dan terima kasih kepada Tjatur tunggal dan masyarakat Losari jang telah dapat menjelesaikan peristiwa Kalirahaju (Losari) dengan djalan musjawarah di samping itu saja merasa ketjewa dengan adanja usaha-usaha tertentu jang mengeruhkan dan memutarbalikkan peristiwa Kalirahaju itu dengan berita-berita propokasi jang dapat menggontjangkan umat Islam”. (Achdian, 2008).

Beberapa kasus di atas merupakan serangkaian tindakan yang mewarnai pelaksanaan *landreform* di Cirebon. Pelaksanaan *landreform* di Cirebon tidak selalu

menimbulkan ketegangan dan pertentangan tajam di pedesaan antara NU dan PKI. Meskipun demikian, persoalan yang timbul dalam pelaksanaan program *landreform* secara radikal oleh PKI dan BTI, bagi NU, sangat meresahkan bagi tuan tanah terutama yang berafiliasi dengan NU.

Bagi kaum muslimin khususnya warga nahdliyyin, serangan ini dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang secara jelas mengizinkan kepemilikan perorangan dan jika diambil secara paksa maka akan dikenakan sanksi berat. Mereka menjadi imbas aksi sepihak karena tidak dipungkiri sebagian lahan di pedesaan di Cirebon, ada beberapa tanah yang dimiliki kaum santri dan keluarga kiai. Oleh karena itu, mereka yang memiliki tanah luas mencoba menghindari peraturan *landreform* dengan mengganti nama mereka atau sebagian tanah langsung disewakan bahkan dijual (Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 2022).

Serangan aksi sepihak yang dilakukan BTI kepada pemilik tanah tampaknya telah diambang batas kesabaran kaum muslimin. Setiap kali terjadi insiden atau muncul ancaman dari PKI, umat Islam dengan sendirinya bergerak melawan PKI bersama para kiai dan pimpinan Ansor Banser di berbagai desa di Cirebon. Akibatnya, aksi demonstrasi ataupun parade yang dilakukan PKI dan BTI merupakan usaha untuk mencaplok lahan dan mengintimidasi para tuan tanah dan pejabat muslim hingga sering terjadi adu kekuatan massa berupa perlawanan skala kecil. Aksi tersebut semakin sering terjadi pada tahun 1964 hingga pertengahan tahun 1965 seperti di, Lemah Abang, Astanajapura, Karang Wareng, Karang Sembung, dan Waled (Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 2022).

Kasus yang terjadi di Cirebon sebenarnya tidak segenting di Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun meningkatnya konflik di daerah menjadi persoalan politik nasional yang harus diselesaikan. Maka pemerintah pusat melalui presiden Soekarno pada 1964 ikut meredam dan menengahi konflik. Pada tanggal 12 Desember 1964. Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan semua organisasi politik. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan di antara partai politik untuk menahan diri dari tindakan yang merugikan setiap pihak dalam pelaksanaan *landreform*. Kesepakatan ini dikenal dengan Deklarasi Bogor. (Achdian, 2008).

Usaha mengatasi ketegangan dan konflik yang timbul merupakan upaya pemerintah meredam gejolak yang semakin tinggi di daerah. Namun, usaha itu tampaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan bertrokan masih terus berlangsung secara sporadis seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah hingga puncaknya yaitu terjadinya peristiwa G30S. (Achdian, 2008).

D. Kondisi Sosial Politik Cirebon Pasca Peristiwa G30S 1965

Setelah terjadi tindakan aksi sepihak yang dilakukan BTI di pedesaan Jawa terutama di Cirebon, tampaknya situasi ini tidak terkontrol oleh pemerintah setempat. Belum lagi saat kondisi politik nasional semakin memanas yang tersirat kabar bahwa Presiden Soekarno mengalami sakit keras dan tidak memungkinkan untuk menjalankan pemerintahan. Di sisi lain, kabar PKI akan melakukan perencanaan penculikan Dewan Jenderal semakin memperburuk keadaan. Tidak hanya itu, dalam keadaan politik mengalami kekacauan, Presiden Soekarno melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Tentu hal ini mengakibatkan keadaan politik semakin tidak terkendali (Sujati, 2021).

Desas-desus PKI melancarkan agenda penculikan Dewan Jenderal nyata adanya. Pada malam 30 September 1965, enam Jenderal dari jajaran pimpinan tertinggi diculik dan dibunuh. Siaran radio pada pagi hari 1 Oktober 1965 memberitakan bahwa gerakan tersebut dilakukan untuk mencegah upaya Dewan Jenderal berhaluan kanan mengambil alih kekuasaan. Siaran radio itu juga memberitakan pernyataan kesetiaan terhadap Soekarno serta pengumuman tentang pembentukan Dewan Revolusi di bawah kendali Presiden (Sujati, 2021).

Peristiwa G30S di Jakarta yang begitu mencekam ternyata berbeda dengan keadaan di Jawa Barat. Menurut Nina Herlina Lubis (2012), suasana di Jawa Barat menjelang aksi itu, masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa dan tidak ada kepanikan. Pemberitaan surat kabar juga hanya menyajikan berita tentang situasi ekonomi yang semakin memburuk serta kenaikan harga kebutuhan pokok di sejumlah tempat.

Di Cirebon belum diketahui kapan berita G30S itu tersebar. Namun, secara umum di Jawa Barat, berita resmi tentang peristiwa di Jakarta baru muncul dua hari setelahnya.

Diberitakan harian *Pikiran Rakjat*, 2 Oktober 1965, lewat Panglima Komando Daerah Militer VI Siliwangi Letjend. TNI Ibrahim Adjie. Publik Jawa Barat akhirnya menyadari adanya kegemparan yang cukup mengejutkan di Ibukota. Melalui pernyataan di surat kabar tersebut, Ibrahim Adjie meminta kepada masyarakat untuk tidak terlalu khawatir dengan kejadian di Jakarta. Ia meminta kepada masyarakat agar menunggu kepastian dari Sukarno sebelum melakukan tindakan apa pun. (Abdullah, 2012).

Sementara, Gubernur Jawa Barat Letjend. TNI Purn. H. Mashudi mengetahui peristiwa tersebut melalui Perdana Menteri Tiongkok Chou En-Lai ketika sedang berada di Peking, Tiongkok dalam rangka lawatan kenegaraan sebagai anggota MPRS. Mashudi bersama anggota MPRS lain serta sejumlah perwira tinggi militer menghadiri undangan Perayaan Hari Nasional Tiongkok 1 Oktober 1965. (Abdullah, 2012).

Mashudi tiba di Indonesia pada 4 Oktober 1965 dan bergegas ke Markas Kostrad guna mendapat penjelasan. Malamnya ia berangkat ke Bandung. Pada 5 Oktober 1965, Mashudi mengadakan rapat pimpinan. Letjend. TNI Ibrahim Adjie turut hadir sekaligus memberi penjelasan terkait peristiwa di Jakarta. Dalam rapat tersebut, para pimpinan di Jawa Barat tidak mengeluarkan pernyataan terkait dukungan kepada Dewan Revolusi, hanya saja daerah Kuningan yang diketahui mencoba membentuk Dewan Revolusi Daerah sehingga Bupatiya segera diamankan demi mencegah kegaduhan di Jawa Barat. (Abdullah, 2012).

Versi lain menyebutkan bahwa agenda pemberontakan PKI di Jakarta sebenarnya sudah diketahui oleh Harjana, selaku Biro Khusus PKI Jawa Barat. Untuk mendukung upaya pemberontakan yang terjadi di Jakarta. PKI Jawa Barat mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan gerakan-gerakan PKI di wilayah Jawa Barat. Biro tersebut kemudian menyusun dan membuat Front Persatuan yang terdiri dari biro khusus di beberapa kabupaten di Jawa Barat seperti di Ciamis, Garut, Tasikmalaya, dan beberapa oknum ABRI yang sudah dibina oleh PKI. Secara bersamaan, Sudisman selaku Sekretaris Komite Central (CC) PKI menugaskan pada pimpinan Komite Daerah Besar (CDB) PKI wilayah Jawa Barat A. Anwar Sanusi untuk mempersiapkan daerah-daerah yang sudah ditentukan untuk mendukung agenda itu. (Djamhari, 2009).

Atas perintah tersebut, Anwar Sanusi melaksanakan sidang harian dan diadakan putusan menunjuk empat simpatisan koordinator bagi daerah-daerah yang menjadi basis gerakan PKI. Adapun daerah-daerah tersebut antara lain Bandung, Ciamis, Garut, Sumedang, dan Tasikmalaya di bawah pimpinan S. Suryana. Daerah Indramayu, Kuningan, Majalengka, dan Cirebon di bawah pimpinan Sutardi. Daerah Bogor, Cianjur, dan Sukabumi dipimpin oleh Suganda. Sedangkan daerah Bekasi, Karawang, dan Subang di bawah pimpinan Mustafa. (Djamhari, 2009).

Terjadinya pemberontakan PKI di Jakarta ditanggapi oleh CDB Jawa Barat yaitu Ismail Bakri dan melakukan pertemuan dengan Ketua Biro Khusus PKI Jawa Barat, Harjana dan anggota CDB PKI Jawa Barat, Suryana. Hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa PKI di Jawa Barat tidak melakukan aksi serupa berdasarkan hasil konsolidasi daerah, sehingga pada 1 Oktober 1965 markas CDB di Bandung ditinggal kabur oleh pemiliknya setelah menghancurkan seluruh dokumen-dokumen penting. (Djamhari, 2009).

1. Gejolak Sosial Politik di Pedesaan

Kondisi di Cirebon pasca pemberontakan yang terjadi di Jakarta, pengaruh organisasi keagamaan maupun organisasi masyarakat dan partai politik tidak terlalu tampak, masing-masing saling membatasi diri. Namun, sejak Komando Militer beralih ke tangan Soeharto dan melaksanakan Operasi Khusus (Opsus) secara spontan seluruh lapisan rakyat, organisasi masyarakat, organisasi politik di daerah Kabupaten Cirebon mengutuk peristiwa tersebut. Situasi di Cirebon tidak terkendali, pengganyangan PKI, aksi massa, pamflet bertebaran, tulisan dan coretan ditembok, bangunan, kantor, perusakan kantor PKI hingga tuntutan pembubaran PKI tidak terhindarkan. Bahkan, tuntutan itu berlaku juga untuk orang-orang Partindo yang dianggap mendukung G30S. (Dispusip Kabupaten Cirebon, 2007).

Dalam situasi dan kondisi yang semakin membahayakan itu, dalam hal ini partai NU Cirebon segera mengambil sikap dengan mengadakan konsolidasi kepada seluruh banom di bawah naungan NU untuk meningkatkan kewaspadaan. Sikap NU demikian tidak hanya karena motif politik, tetapi juga motif agama, karena bagaimanapun juga NU memandang PKI bukan hanya sebagai lawan politiknya melainkan lawan dari ideologi komunis yang

harus diberantas. Di kediaman Kiai Umar Anas Sidamulya, Buntet Pesantren menjadi markas kekuatan NU untuk memberantas PKI beserta antek-anteknya terutama BTI. Saat itu, tokoh NU yaitu KH. Mustamid Abbas bersama Ansor Banser, para santri, alumni, pelajar, pemuda, dan ABRI menuntut pemerintah segera membubarkan PKI. (Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 2022).

Pertentangan antara militer dengan PKI maupun NU-PKI di Cirebon imbasnya terjadi gerakan skala kecil di beberapa tempat. Berdasarkan surat kabar Pikiran Rakyat "*Korban-korban Petualangan Teroris G30S*" pada Oktober 1965, melaporkan kasus di Indramayu, orang yang terindikasi PKI menjadi korban. Di Majalengka ada anggota PKI yang hampir membunuh pimpinannya dikarenakan dirinya merasa ditipu. Di Cirebon, PKI dan ormas-ormas mendatangi Ketua PKI Rangkila di desa Karang Tinggi, Kapetakan dan Ketua BTI Cikecuk, Plumbon. Mereka menyeret Rangkila dari rumah dan berteriak "*sira kang gawe sengsara kita*" (*kamu yang membuatku sengsara*). Bahkan di suatu desa menurut Kodim 0614 Daerah Cirebon, Buchori menyebut ada tokoh PKI yang dibunuh anggotanya sendiri. Namun, kejadian itu tidak meluas. (Pikiran Rakjat, 8 Ootktober 1965).

Melihat situasi demikian, Gubernur Jawa Barat, Letjend. TNI Purn. H. Mashudi mengeluarkan serangkaian tindakan yang berkaitan dengan aparatur pemerintahan. Mashudi secara maraton mengadakan rapat-rapat insidental dengan para Bupati/Kepala Daerah dan Walikota. Ia kemudian membuat pernyataan mendukung pemerintah dan mengutuk Dewan Revolusi. Sementara itu, di Cirebon, tuntutan rakyat dan mahasiswa agar PKI dibubarkan semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan itu, secara internal Mashudi mengamankan pejabat-pejabat yang jelas-jelas sebagai anggota PKI, misalnya anggota BPH tingkat I Jawa Barat, Walikota Cirebon, Prabowo diberhentikan agar "*huisarest*", untuk menghindari tindakan penghakiman oleh masyarakat seperti yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. (Abdullah, 2012).

Melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Provinsi Jawa Barat No. 148/X/B.IV/HUK/PENG/65 tanggal 26 Oktober 1965, yang pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari pernyataan DPRD-GR Tingkat I Jawa Barat No. 5/Pernj.DPRD-

GR/65, Mashudi memberhentikan sementara delapan anggota PKI yang duduk di DPR-GR Jawa Barat di antaranya Suharna Affandi (anggota merangkap wakil ketua DPRD-GR DT I Jawa Barat), Abbas Usman, Akhmad Suganda, Enok Rokhayati, Mustofa, Cece Suryadi, Sukra Prawira Sentana dan Suhalan Sujana. (Abdullah, 2012).

Pada 2 November 1965, Mashudi kembali mengeluarkan instruksi Gubernur kepada Daerah Jawa Barat No. 211/Staf/T.U/65 tentang Pengamanan dan Pembersihan Aparatur Negara/Daerah dari unsur-unsur G30S. di dalam instruksi tersebut dijelaskan untuk menindak secara administratif aparatur daerah/pejabat politik yang dicurigai terlibat PKI. Kemudian dikeluarkan beberapa instruksi gubernur lainnya. Misalnya Instruksi Gubernur No. 216/Staf/T.U/Instr/65 tertanggal 5 November 1965 mengatur tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh para pejabat di daerah terhadap gerombolan kontra revolusioner G30S yang bekerja di dunia pendidikan, khususnya lembaga-lembaga pendidikan swasta. Selanjutnya, instruksi Gubernur No. 219/B.I/Pem/Instr/65 tertanggal 15 November 1965 mengatur penahanan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam gerakan 30 September. Instruksi tertanggal 15 November 15 November 1965 ini juga menegaskan bahwa sebagai tindak lanjut atau upaya untuk mencapai hasil maksimal berkaitan dengan penahanan terhadap oknum yang terlibat G30S. (Abdullah, 2012).

Mashudi memerintahkan kepada Bupati/Walikota serta pimpinan daerah tingkat II seluruh Jawa Barat bahwa bagi aparatur yang terbukti sebagai pimpinan, anggota PKI dan terlibat mendukung G30S segera dilakukan penahanan kemudian selama masa tahanan akan diberikan indoktrinasi mengenai ideologi negara. Tidak ketinggalan Letjend. TNI Ibrahim Adjie untuk sementara waktu memerintahkan kepada kesatuan di bawahnya untuk menangkap dan mengamankan para anggota dan simpatisan PKI. (Abdullah, 2012).

Pada bulan yang sama setelah menerima berita bahwa peristiwa G30S di Cirebon dinyatakan gagal maka para pimpinan dan anggota PKI Cirebon dengan sendirinya membubarkan diri. (Dispusip Kabupaten Cirebon, 2007). Di Cirebon bagian Timur seperti di Astanajapura, anggota PKI diincar militer. Para simpatisan sebagian ada yang disiksa namun tidak menimbulkan korban jiwa.

Ada dari mereka yang berhasil melarikan diri. Di Karangwareng hingga Ciledug, menurut informasi bahwa anggota PKI di bawa paksa, sehingga sering terjadi penolakan. Informasi yang saat ini menjadi perdebatan adalah kasus pembuangan mayat anggota PKI di Desa Rawa Urip. Di desa tersebut terdapat sebuah lahan luas yang di percaya masyarakat setempat sebagai lokasi pembuangan mayat Eks PKI. (Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 2022).

Dalam suatu koran Harian Rakyat Cirebon "*Kuburan Massal Korban Tragedi 1955 ditemukan di Cirebon*" memberitakan penemuan lokasi kuburan massal di Blok Dongkol Desa Asem Lemah Abang, tepatnya kira-kira 4 kilometer di belakang Pabrik Gula Karangsung. Pasca G30S di mana ada 8 orang yang dituduh PKI lalu dibunuh tanpa melalui proses hukum. (Pro Rakyat, 5 Agustus 2020).

Meskipun telah terjadi gejolak di berbagai daerah di Cirebon, secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi di Cirebon tidak segenting di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam skala besar. Diperkirakan ratusan ribu orang menjadi korban pembantaian: 800.000 orang di Jawa Tengah dan Jawa Timur, 100.000 orang lebih di Bali, 10.000 orang di Sulawesi dan Nusa Tenggara (termasuk di Timor Barat), dan 6.000 orang di Aceh, kurang dari 1.000 orang di Kalimantan Selatan. Dari jumlah yang tewas itu, diduga orang komunis hanya 20%. (Abdullah, 2012).

Kondisi di Jawa Barat terutama di Cirebon relatif tidak bergejolak bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain disebabkan oleh kehadiran kiai lokal yang moderat di beberapa pedesaan di Cirebon menjadi salah satu faktornya. Pasca peristiwa G30S, mereka berusaha menjaga ketertiban agar tidak terjadi hal-hal buruk seperti yang dilakukan KH. Mustamid Abbas. Meskipun ia bersama barisan santri dan Ansor Banser mengutuk peristiwa tersebut, namun sebatas perlawanan massa bukan perlawanan secara fisik. KH. Mustamid Abbas menghindari pertumpahan darah, sehingga dapat diikuti oleh masyarakat setempat, karena bagaimanapun juga kiai memiliki otoritas mutlak di tengah-tengah masyarakat. Belum lagi masyarakat Cirebon di pedesaan yang sangat menjunjung dan menghormati derajat seorang kiai. (Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 2022).

Nina Herlina Lubis menilai bahwa di Jawa Barat, pasca G30S relatif aman dan tidak ada pembantaian massal. Hal ini dikarenakan berkat upaya pencegahan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Letjend. TNI Purn. H. Mashudi dan Letjend. TNI Ibrahim Adjie. Gubernur segera melakukan rapat-rapat insidental kemudian mengeluarkan serangkaian kebijakan, salah satunya mengamankan serta menangkap para anggota PKI. Instruksi tersebut kemudian diikuti oleh masing-masing daerah di Jawa Barat terutama Cirebon, sehingga relatif aman bahkan pasca G30S para anggota PKI di Jawa Barat dengan sendirinya membubarkan diri. (Abdullah, 2012).

Pasca G30S, pada bulan April 1966 di Cirebon terjadi aksi unjuk rasa oleh berbagai organisasi kepemudaan, mahasiswa, buruh dan pelajar. Aksi demonstrasi tersebut bertujuan agar PKI segera dibubarkan secara resmi. Aksi itu berlokasi di Gedung Pemerintahan Kabupaten maupun di Balai Kota Cirebon. Dalam aksi tersebut diinisiasi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), kemudian disusul Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pemuda (KOKADA), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Pengusaha Nasional Indonesia (KAPNI), Kesatuan Aksi Penyelamat Pendidikan Pancasila (KP3). Berbagai organisasi tersebut menamakan dirinya dengan "angkatan 1966" dan menuntut Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yang isinya bubarkan PKI, rombak kabinet Dwikora, dan turunkan harga. (Dispusip Kabupaten Cirebon, 2007).

2. Pembersihan Birokrasi dan Pembubaran PKI

Sejak terjadinya peristiwa G30S 1965, seluruh lapisan masyarakat terutama warga NU mengecam tindakan tersebut tidak terkecuali di Jawa Barat. Situasi genting yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di Cirebon Jawa Barat tidak melakukan aksi serupa. Upaya pencegahan terhadap aksi PKI segera dilakukan baik di tingkat provinsi maupun daerah. Gubernur Jawa Barat H. Mashudi mengeluarkan perintah untuk menangkap anggota PKI beserta anteknya-anteknya. Gubernur juga membuat aturan melarang seluruh pejabat daerah yang diduga terlibat dengan PKI agar segera diberhentikan. Hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pengesahan, Pemecatan

Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa/Desapraja, serta Alat Kelengkapan Desa/Desapraja Lainnya di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan perintah Gubernur Jawa Barat tentang aturan yang melarang seluruh pejabat negara yang diduga terlibat dengan PKI segera di non-aktifkan, maka berlaku juga di Cirebon. Dalam hal ini Wali Kota Cirebon RSA. Prabowo yang dianggap sebagai pendukung PKI di copot jabatannya kemudian digantikan oleh R. Sukardi (1965-1966). Pada tahun 1966 jabatan walikota dipegang oleh Letkol Tatang Suwardi sampai tahun 1974 (Herlina Lubis, 2015).

Bupati Kabupaten Cirebon E. Harun Zainal Abidin (1960-1966) yang terindikasi sebagai kader PKI segera diberhentikan dari Jabatannya dan dipenjara pada tahun 1966. Untuk mengisi kekosongan jabatan, pada 29 Oktober 1965 diangkatlah R. Soemito sebagai Pemerintah Daerah (PD) Bupati Kepala Daerah Cirebon merangkap ketua DPRD-GR yang dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Letjend. TNI Purn. H. Mashudi (Dispusip Kabupaten Cirebon, 2007).

R. Soemito bersama Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Papelrada) Kabupaten Cirebon kemudian mengambil tindakan pengamanan dan pembersihan terhadap anggota PKI yang diduga terlibat dan berindikasi dengan G30S. Mereka diberhentikan dengan tidak hormat. Banyak diantara pegawai dan pejabat dipenjara di Kodim 0614 Cirebon. Berikut daftar Kepala Desa, Pegawai, Pejabat di Kabupaten Cirebon yang diberhentikan maupun dishors.

“dari 294 desa di Kabupaten Cirebon, 29 Kepala Desa diberhentikan dengan tidak hormat, 1 orang Kepala Desa dishors, 2 Orang Kepala Desa dishors namun tidak terbukti sebagai anggota PKI. Untuk mengisi kekosongan itu maka Bupati dan Papelrada Kabupaten Cirebon menempatkan 20 Kepala Desa dari Anggota TNI-AD, 5 dari anggota AKRI, 4 dari Pamong Desa, 1 dari rakyat mantan Kepala Desa, 1 dari anggota Veteran dan 1 dari anggota Front Nasional. Sementara untuk pegawai dan pejabat di Kabupaten, 1 orang Bupati Kepala Daerah Cirebon diberhentikan, 1 Sekretaris daerah dicutikan, 1 anggota BPH dicutikan, 2 anggota BPH diberhentikan, 11 anggota DPRD-GR

diberhentikan, 29 orang pegawai (7 pegawai daerah dan 22 pegawai pemerintahan) dishors, 1 pegawai pemerintahan dipecat, 4 orang asisten Wedana diamankan, dan 8 pegawai dicutikan”. (Dispusip Kabupaten Cirebon, 2007).

Setelah proses pergantian jabatan berlangsung pada 2 Maret-17 Mei 1966, hal ini menguntungkan partai NU karena dari 11 anggota DPRD-GR yang diberhentikan sebagaimana disebutkan di atas, 3 jabatan diisi oleh partai NU yaitu Hasan Rahmat. Ia adalah Ketua tanfidziah partai NU Periode 1960-1968 kemudian diangkat sebagai ketua DPRD-GR yang dilantik pada 2 Maret 1966. Selanjutnya Mohammad Tarjadhi S.A dan Mashum Shaleh sebagai anggota DPRD-GR yang dilantik pada 14 April 1966. Sementara anggota NU yang sedang menjabat sebagai anggota DPRD-GR tetap dipertahankan antara lain Abdullah Nasichin, Maemunah Zaidin, H. Anwar, H. Muslim, dan H. Rumli. (Dispusip Kabupaten Cirebon, 2007).

Posisi NU pada saat itu tidak lepas dari konsolidasi yang dilakukan Achmad Saichu Wakil Ketua DPRD-GR Pusat dari Fraksi NU. Di mana pada 20 Maret 1966 setelah PKI dibubarkan, ia hadir di Cirebon dalam rangka memperingati Hari Lahir NU ke-40. Pada kesempatan itu, selain menghadiri acara tersebut, ia menyempatkan bertemu dengan pemerintah setempat untuk membahas tentang keadaan politik di Kabupaten Cirebon terutama tentang pergantian jabatan di DPRD-GR, sehingga setelah pertemuan itu posisi NU semakin strategis dibanding dengan partai lain seperti PNI, PSII dan Parkindo (Dispusip Kabupaten Cirebon, 2007). Bagi NU, saat mengadakan perayaan Hari Lahir ke-40 adalah salah satu upaya pengerahan massa untuk menunjukkan eksistensinya sebagai satu-satunya partai Islam terbesar di Kabupaten Cirebon (Rofi'i, Rochwulaningsih, and Alamsyah, 2022).

KESIMPULAN

Kondisi sosial politik sebelum peristiwa G30S 1965 tidak terlepas dari keadaan politik sebelumnya yakni antara tahun 1955 sampai 1960-an. Pada masa itu, baik sejak bergulirnya pemilu 1955 maupun setelah penetapan UUPA No. 5/1960 yang mengatur pemilikan dan penguasaan tanah serta Undang-undang Pertahanan dan Bagi Hasil No. 2/1960, di

Cirebon mengakibatkan persaingan di antara partai politik terutama NU dan PKI terus memanas. Konflik keduanya berlanjut hingga periode 1960-an ketika PKI melancarkan aksi sepihak. Beberapa kasus di Cirebon ditemukan di beberapa tempat seperti di Losari.

Melihat maraknya konflik yang terjadi di berbagai daerah Indonesia, dalam hal ini pemerintah pusat ikut campur tangan untuk meredam gejolak yang semakin tinggi. Namun, usaha tersebut tampaknya sulit untuk dilaksanakan. Bentrokan masih terus berlangsung secara sporadis di Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga puncaknya terjadi peristiwa G30S 1965.

Pasca G30S, keadaan di Cirebon tidak separah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun demikian, beberapa kasus dilaporkan di beberapa tempat antara lain di Balai Kota Cirebon, ormas maupun partai politik melakukan aksi demonstrasi mengutuk PKI hingga merusakkan kantor PKI. Selain itu, kasus intimidasi oleh warga kepada anggota BTI di Kapetakan, kemudian penangkapan anggota PKI di Cikeduk Plumbon, Astanajapura, Karang Wareng dan Ciledug. Aksi penangkapan di daerah-daerah tersebut informasi sementara tidak disertai dengan aksi pembunuhan ataupun pembantaian secara massal melainkan mereka anggota PKI mendapat intimidasi dan kekerasan oleh warga sekitar dan militer.

Kondisi sosial politik di Cirebon cukup stabil. Tindakan masyarakat dalam menjaga kestabilan sosial politik dipengaruhi oleh kepercayaan yang berkembang di beberapa desa. Di Buntet Cirebon, KH. Mustamid Abbas berupaya menghindari pertumpahan darah, sehingga diikuti oleh masyarakat setempat. Di samping itu, Gerak cepat Gubernur Jawa Barat Letjend. TNI Purn. H. Mashudi dan Letjend. TNI Ibrahim Adjie untuk mengatasi kekacauan sosial politik di Jawa Barat juga membuahkan hasil yang manis. Mereka segera mengeluarkan perintah untuk menangkap dan memberhentikan tokoh-tokoh dan pejabat yang terindikasi sebagai anggota PKI. Oleh sebab itu, kondisi Jawa Barat relatif kondusif dan tidak bergejolak pasca peristiwa G30S.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, T. dkk. (2012). *Malam Bencana 1965 Dalam Belitan Krisis Nasional*:

Bagian II Konflik Lokal. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Achdian, A. (2008). *Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*. Kekal Press.

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2019). *Naskah Sumber Arsip: Jejak Demokrasi Pemilu 1955*. ANRI.

Cribb, R. (2004). *The Indonesian killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Matabangsa.

Djamhari, S. A. (2009). *Komunisme di Indonesia: Penumpasan pemberontakan PKI dan sisa-sisanya (1965-1981)*. PUSJARA TNI.

Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.

Lindblad, J. T. (2002). *Fondasi historis ekonomi Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Lucas, A. (2019). *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi*. Media Pressindo.

Pratikno, F. (2000). *Gerakan rakyat kelaparan: Gagalnya politik radikalisme petani*. Media Pressindo.

Sujati, B. (2021). *Sejarah Nahdlatul Ulama Jawa Barat*. Zahir Publishing.

Arsip dan Dokumen

ANRI. *Inventaris Arsip Komando Operasi Tertinggi, Ringkasan Pidato D.N. Aidit pada Rapat Umum PKI di Cirebon, No. 458*. (2015).

Dispusip Kabupaten Cirebon. (2007). *Buku Tjoretan dan Tjatatatan serta Sorotan*. Dinas Kearsipan dan Dokumen Kabupaten Cirebon.

Dispusip Kabupaten Cirebon. (2014). *Sejarah Pemerintahan Kabupaten Cirebon 1942-1955*. Dispusip Kab. Cirebon.

Dispusipda Provinsi Jawa Barat Arsip Audio Visual No.493, 494, 495, 496, 497.

Artikel dalam Koran

Pikiran Rakjat. 8 Oktober 1965. *Korban-korban Petualangan Teroris G30S*.

Pro Rakyat. 5 Agustus 2020. *Kuburan Massal Korban Tragedi 1955 ditemukan di Cirebon*.

Disertasi, Laporan Penelitian

Herlina Lubis, N. (2015). *Story Line Sejarah Kota Cirebon*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran.

Nur Arovah, E. (2018). *Cirebon 1681-1945: Dinamika Politik, Ekonomi, dan Sosial*

Budaya. Bandung: Disertasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjjaran.

Artikel dalam Jurnal atau Majalah

- Rofi'i, A. F. (2023). Dinamika Partai Nahdlatul Ulama dalam Konstelasi Politik di Kabupaten Cirebon Tahun 1952-1955. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 7(1), 50–66.
- Rofi'i, A. F., Rochwulaningsih, Y., & Alamsyah, A. (2022). Political Strategy of Nahdlatul Ulama Party in Cirebon Regency during 1952-1967. *Indonesian Historical Studies*, 6(1), 78–93.
- Rofii, A. F., & Sujati, B. (2022). PERJUANGAN KEMERDEKAAN KIAI ABBAS BUNTET CIREBON PADA 1928-1945. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 8(2), 65.